

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Panggung internasional merupakan tempat yang kejam bagi negara untuk bertahan hidup karena kondisi anarki yang tidak pernah hangus dari eksistensi dan interaksi antar negara, kondisi ini kerap kali membawa konflik bersenjata yang dikarenakan oleh keserakahan individu untuk kebaikan negaranya maupun dipandang buruk atau baik bagi berbagai perspektif namun yang harus disetujui bahwa konflik bersenjata yang dilahirkan oleh individu-individu tersebut cenderung membawa ras manusia kepada ambang kepunahan. Konflik seperti Perang 30 Tahun, Perang Napoleon, Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 dan Perang Dingin merupakan beberapa contoh dari kekejaman manusia yang dapat menghancurkan jutaan jiwa dan menyiksa mereka yang masih hidup dalam zona konflik, dalam rentang waktu beberapa tahun populasi dunia turun drastis karena konflik berkecamuk hampir di semua belahan planet bumi.

Namun setelah Perang Dingin berakhir intensitas konflik antar negara mulai berkurang, kondisi ini didukung dengan berdirinya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mendorong komunitas internasional untuk menggunakan cara yang beradab untuk menyelesaikan konflik. Bilamana pada era Perang Napoleon konflik antara berbagai kerajaan di Eropa cenderung berakhir dalam peperangan yang panjang tetapi pada era informasi negara yang mempunyai isu dengan negara lainnya dapat membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional dan mencari solusi dengan cara yang damai. Kondisi dunia yang

sudah mereda dari konflik membawa berbagai negara ke fase interdependensi dimana berbagai negara harus berinteraksi dengan negara lain guna bertahan hidup, meskipun kondisi dunia sudah reda dari konflik antar negara konflik baru muncul untuk menghantui negara.

Perang Dingin melahirkan banyak negara baru seperti Kongo, Bosnia dan Herzegovina, Bangladesh bahkan Pakistan namun perang tersebut tidak hanya melahirkan negara tetapi juga melahirkan baru yakni entitas aktor non-negara seperti *freedom fighter*. Entitas baru ini muncul karena didorong kebutuhan akan bertahan hidup melawan entitas yang lebih besar yakni negara, salah satu contoh *freedom fighter* yang sukses melawan penjajahan ialah Mujahidin di Afghanistan. Pertempuran kolosal dan historis antara Mujahidin melawan Uni Soviet selalu terukir dalam dinding sejarah sebagai salah satu *asymmetric warfare* yang sukses tetapi kemenangan Mujahidin juga dikenang sebagai lahirnya organisasi terorisme yang mengancam kedaulatan negara seperti Al-Qaeda.

Proyeksi kekuatan Al-Qaeda dalam Tragedi 11 September 2001 meledakan sebuah tren bagi golongan ekstrimis untuk melawan negara, sayangnya tren tersebut juga dianut oleh organisasi ekstrimis asal Indonesia yang dikenal dengan Jema'ah Islamiyah. Bagi pemerintah dan rakyat Indonesia nama Jema'ah Islamiyah bukanlah nama yang baru, pada era Revolusi Nasional Jema'ah Islamiyah dikenal dengan nama Darul Islam, kelompok ini bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia namun berhasil ditumpas pada tahun 1962 tetapi banyak anggota Darul Islam berhasil kabur dari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Jema'ah Islamiyah berperan sebagai regenerasi dari Darul

Islam yang masih mempunyai tujuan yang sama yakni mendirikan Negara Islam Indonesia namun dengan strategi dan kapabilitas yang berbeda.

Jema'ah Islamiyah melakukan berbagai serangan teror untuk mendapatkan apa yang mereka dambakan sama seperti Al-Qaeda, persamaan ini mendorong 2 negara demokrasi besar yakni Indonesia dan Amerika Serikat untuk bekerjasama dalam menangani isu tersebut. Bagi kedua negara tersebut bahaya terorisme merupakan bahaya laten yang harus segera ditangani baik Indonesia maupun Amerika Serikat telah mengalami serangan teror yang destruktif dalam 2 serangan berbeda. Dalam kondisi dunia yang anarki mewajibkan negara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri seperti yang tertera di Koverensi Montevideo namun dalam kasus-kasus tertentu negara harus menjalin kerjasama untuk menjaga ketahanan nasionalnya dari bahaya tersebut dan mengesampingkan segala paradigma buruk mengenai sesama.

Isu terorisme merupakan isu yang baru bagi dunia internasional oleh karena itu menyebabkan banyak negara tidak mempunyai sarana untuk menanggulangi ancaman tersebut, lalu isu terorisme mempunyai berbagai perbedaan penindakan oleh negara di dunia, bagi Amerika Serikat terorisme merupakan tindakan yang cenderung diselesaikan melalui solusi militer karena keseringan kali Amerika Serikat melawan terorisme diluar wilayahnya yang jauh di dalam jangkauan yurisdiksi kepolisian. Namun bagi Indonesia tindakan terorisme kerap kali terjadi dalam wilayah kedaulatan Indonesia sehingga menimbulkan perdebatan apakah bahaya terorisme harus diselesaikan dengan solusi militer atau melalui proses hukum dengan terlibatnya kepolisian.

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat diperkuat melalui program ATA dimana memberikan wewenang kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mendanai dan melatih aparat keamanan Indonesia, namun primadona dari program ATA ialah pembentukan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) yang berada dibawah payung kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pembentukan satuan khusus ini dijadikan prioritas bagi Indonesia dan Amerika Serikat karena Polri membutuhkan tim elit untuk membekuk organisasi Jema'ah Islamiyah, pengutamaan pembentukan Densus 88 juga dikarenakan karena Indonesia melihat tindakan terorisme sebagai kejahatan pidana luar biasa yang masih dalam yurisdiksi Polri, berbeda dengan kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimana kedua kelompok tersebut lebih condong ke gerakan separatisme dimana merupakan ranah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pembentukan Densus 88 ditujukan dengan spesifik yakni bertugas dan mempunyai otoritas untuk menangani kejahatan terorisme, bahkan dalam satuan tersebut tidak hanya terdapat pasukan serbu untuk menyerang posisi teroris namun juga terdapat investigator untuk menggali informasi mengenai keberadaan terorisme serta untuk memproses Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta unit khusus untuk menangani bom bahkan senjata penanganan senjata pemusnah masal. Kerjasama anti-teror antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pembentukan Densus 88 dinilai menjadi salah satu hubungan bilateral keamanan yang sukses, kinerja pasukan khusus tersebut telah membuahkan hasil berupa penangkapan maupun pembunuhan berbagai anggota dan pimpinan Jema'ah

Islamiyah juga kegagalan berbagai rencana serangan teror yang direncanakan oleh kelompok teror tersebut.

#### **4.1 Kritik dan Masukan**

Upaya kerjasama yang dilakukan oleh Republik Indonesia dan Amerika Serikat merupakan suatu keberhasilan yang menguntungkan bagi kedua negara, namun penulis berargumen bahwa kerjasama yang dilakukan antara kedua negara tersebut seharusnya tidak memfokuskan pada pembentukan Densus 88 saja namun kepada sektor lain seperti keuangan dan militer. Dalam era informasi ini transaksi dana melalui sarana internet sudah bukan asing lagi, tidak bisa disangkal bahwa banyak dana yang masuk bagi kelompok teroris datang melewati jalur tersebut. Keamanan keuangan *cyber* sangat dibutuhkan bila memang ingin menumpas entitas terorisme, memang dalam ATA terdapat aspek yang memperkuat keamanan keuangan *cyber* untuk melacak dana namun upaya kerjasama dalam aspek ini masih harus diperkuat. Karena dana yang didapatkan oleh organisasi teror bisa datang dari mana saja, bila dana tersebut datang dari sebuah organisasi maupun negara maka dana tersebut tidak susah terlacak karena terpusat namun bila dana tersebut datang dari individu yang berbeda-beda itu menimbulkan permasalahan yang besar.

Lalu permasalahan yang menjadi perdebatan di kalangan rakyat Indonesia sendiri yakni keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Tidak bisa dipungkiri bahwa terorisme merupakan suatu isu yang mengancam tergolong sebagai ancaman nasional dan seharusnya TNI mempunyai hak untuk menetralkan ancaman yang dianggap sebagai ancaman nasional tetapi dalam isu terorisme di

Indonesia TNI mempunyai sangat sedikit andil dalam berperang menghadapi kelompok terorisme. Bagi penulis elemen TNI dalam pemberantasan terorisme sangat dibutuhkan meskipun ranah terorisme termasuk dalam kejahatan pidana luar biasa, keahlian TNI dibutuhkan oleh Indonesia untuk mensolidasikan kekuatan anti-teror yang telah didirikan oleh Polri. Pada kasus pemburuan Santoso pada tahun 2016 terbukti bahwa dalam operasional Polri tidak memungkinkan untuk menjalani operasi yang memakan waktu lama, mata rantai Polri tidak seperti TNI yang mempunyai mata rantai *supply* yang panjang sehingga memungkinkan bagi TNI untuk menjalani operasi selama yang mereka butuhkan.

Pernyataan pada paragraf sebelumnya penulis tidak bermaksud untuk meremehkan kekuatan Polri namun pada nyatanya yang menjadi kelemahan Polri dalam operasi yang memakan waktu lama ialah mata rantai yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan operasi dalam waktu lama. Polri mempunyai keahlian dalam penangkapan kelompok teroris yang terdapat di kota bahkan desa namun jika kelompok tersebut bernaung di dalam hutan itu sudah menjadi permasalahan. Penulis berargumen bahwa kedua elemen TNI dan Polri merupakan sangat penting dalam pertempuran Indonesia dengan kelompok teroris, seperti yang telah dijelaskan oleh Purnawirawan Jendral Kiki Syahnakri bahwa Indonesia harus melihat Inggris dalam menangani terorisme di Irlandia Utara dimana militer dan polisi Inggris bekerjasama dalam penanganan kelompok bersenjata IRA.

## Daftar Pustaka

### Buku

Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, and Beth A. Simmons, eds. *Hanbook of International Relations*. London: SAGA Publications, 2002.

Chaliand, Gérard, and Arnaud Blin, eds. *The History of Terrorism: From Antiquity to Al Qaeda*. Berkeley, California: Univ. of California Press, 2010.

Christie, Kenneth. *United States foreign policy and national identity in the 21st century*. London: Routledge, 2008.

Manullang, A.C. *Terorisme & perang intelijen: behauptung ohne beweis: dugaan tanpa bukti: behind the scene*. Jakarta: Manna Zaitun, 2006.

### Publikasi Pemerintah

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. *INDONESIA-UNITED STATES SECURITY DIALOGUE III*. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. N.p., 10 Aug. 2005.

*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, signed at Montevideo 26<sup>th</sup> December 1933*

"Operation Trikora - Indonesia's Takeover of West New Guinea." no. 150 (February 2011). Air Power Development Centre.

*Policies of the Bush Administration 2001-2009*. Publication. Washington DC: White House Office of Communication.

Taufiq, Marga. *Peningkatan Pencegahan Radikalisme Guna Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Technical paper. Jakarta, DKI Jakarta: Lembaga Ketahanan R, 2013. 10.

*The Antiterrorism Assistance Program: Report to Congress for Fiscal Year 2003*. Report. United States Department of State. Series 11131. Washington DC: Bureau of Diplomatic Security and the Office of the Coordinator for Counterterrorism, 2004.

*The Antiterrorism Assistance Program: Report to Congress for Fiscal Year 2005*, report, United States Department of State, series 11131 (Washington DC: Bureau of Diplomatic Security and the Office of the Coordinator for Counterterrorism, 2006).

Vaughn, Bruce, et al., *Terrorism in Southeast Asia*, report, CRS Report for Congress (Washington DC: Congressional Research Service , 2009).

Wise, William M. *Indonesia's War on Terror*. Publication. Embassy of the United States of America. United States - Indonesia Society.

### **Situs Web**

"Anti-Terrorism Assistance Program (ATA)." U.S. Department of State. diakses Juli 01, 2016. <https://www.state.gov/j/ct/programs/ata/index.htm>.

Brian, Adam O. 2005. "The U.S.-Indonesian Military Relationship". *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/backgrounders/us-indonesian-military-relationship>.

"Fall of the Soviet Union". *History.com*. <http://www.history.com/topics/cold-war/fall-of-soviet-union>.



"Foreign Policy". *Embassy of the Republic of Indonesia*.

<http://www.embassyofindonesia.org/index.php/foreign-policy/>.

"Gerakan Non-Blok (GNB)". *Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia*.

<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Gerakan-Non-Blok.aspx>.

Hatta, Mohammad. "Indonesia's Foreign Policy". *Foreign Affairs*.

<https://www.foreignaffairs.com/articles/indonesia/1953-04-01/indonesias-foreign-policy>.

"History and Evolution of Non-Aligned Movement". *Ministry of External Affairs*

*Government of India*. <http://mea.gov.in/in-focus-article.htm?20349/History+and+Evolution+of+NonAligned+Movement>.

Nau, Stella Clarissa. 2010. "Sejarah dan Relevansi Politik Luar Negeri Bebas

Aktif". *KOMPASIANA*. [http://www.kompasiana.com/stellaclarisa/sejarah-dan-relevansi-politik-luar-negeri-bebas-aktif\\_54ff7671a333114e4a510430](http://www.kompasiana.com/stellaclarisa/sejarah-dan-relevansi-politik-luar-negeri-bebas-aktif_54ff7671a333114e4a510430).

"Santa Cruz Massacre". *Conflict in East Timor*.

<https://www.mtholyoke.edu/~rgwhitma/classweb2/Santa%20Cruz%20Massacre.htm>.

"The Birth of the Indonesian Nation, 1945 – 1949: Perspectives on the Role of the

United States | USINDO". *Usindo.org*.

<http://www.usindo.org/resources/the-birth-of-the-indonesian-nation-1945-%E2%80%93-1949-perspectives-on-the-role-of-the-united-states/>.

"The Truman Doctrine 1947." U.S. Department of State.  
<https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine>.

### **Jurnal**

Campbell, Anthony. "The Assassins of Alamut," Iran Chamber Society.

Gordon, David, and Samuel Lindo. "Jema'ah Islamiyah." *AQAM Futures Project Case Studies Series*, 6th ser. (November 2011).

Seniawati dan Andi Alimuddin, "THE UNITED STATES – INDONESIAN MILITARY RELATIONSHIP IN COUNTERING TERRORISM IN INDONESIA," *International Journal of Management and Applied Science* 2, no. 8 (Agustus 2016),

Schmid, Alex. *Terrorism - The Definitional Problem*. Report. School of Law, Case Western Reserve University. Vol. 36. Series 2. Cleveland, Ohio: Case Western Reserve University, 2004. 377.

### **Wawancara**

Daki-Soo, Valens dan Simon Leya wawancara. 2016-2017. "*Latar Belakang Detasemen Khusus 88 dan Peran Amerika Serikat dalam Terbentuknya Kekuatan Anti-Terror di Indonesia*". Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia

Suharto, Bambang dan Pangeran Ibrani Situmorang wawancara. 2017. "*Hubungan Kerjasama Anti-Terrorisme Antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat*". Kementerian Luar Negeri Gedung Utama 3rd Floor,, Jl.

Taman Pejambon No. 6, RT.9/RW.5, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia

Syahnakri, Kiki wawancara. 2017 *“Hubungan Bilateral Bidang Keamanan  
Antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat”*. Kawasan Niaga  
Terpadu Sudirman (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Senayan,  
Kebayoran Baru, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia